

# Jasa Pengiriman Paket Kecil di Indonesia

## Pokok Bahasan

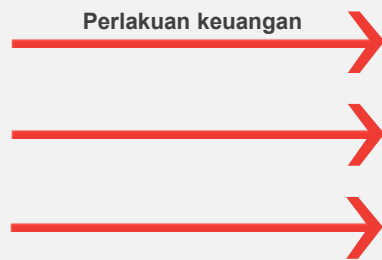
Netralitas kompetitif (bisnis milik negara dan swasta bersaing di lapangan bermain yang setara) memastikan bahwa semua perusahaan, publik atau swasta, domestik atau asing, menghadapi seperangkat aturan yang sama. Memastikan lapangan permainan yang setara antara pelaku pasar publik dan swasta mengarah pada lebih banyak pilihan, kualitas yang lebih tinggi, dan harga yang lebih rendah bagi konsumen dan pada akhirnya menguntungkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Inilah alasan mengapa sangat berguna untuk menilai dampak BUMN terhadap persaingan.

OECD ditugaskan oleh Sekretariat ASEAN dan ASEAN *Expert Group on Competition*, dengan pendanaan dari ASEAN Economic Reform Programme under the UK Foreign, Commonwealth & Development Office (Pemerintah Inggris), untuk melakukan penilaian independen terhadap dampak badan usaha milik negara (BUMN) terhadap persaingan di sektor jasa pengiriman paket kecil di ASEAN. Hasil penilaian tersebut dapat membantu mendorong lapangan permainan yang setara antara BUMN dan entitas swasta di ASEAN dan membantu mendeteksi hak khusus dan hak istimewa yang diberikan kepada BUMN yang memengaruhi pertumbuhan dan daya saing jangka panjang. Dokumen ini menyajikan pokok bahasan dan temuan utama dari penilaian dan kajian lengkap tersedia di [oe.cd/comp-asean](http://oe.cd/comp-asean).

Kajian tersebut merupakan hasil penilaian oleh OECD berdasarkan analisis terhadap undang-undang Indonesia yang dipilih (diprioritaskan), wawancara dengan pemangku kepentingan, dan studi pustaka. Kajian tersebut dilakukan secara bertahap. **Tahap 1** bertujuan untuk menentukan ruang lingkup penelitian yang spesifik. PT Pos Indonesia (Pos Indonesia) diidentifikasi sebagai BUMN yang relevan, dan hukum dan peraturan utama serta informasi terkait BUMN lainnya dianalisis. Tim OECD bertemu dengan otoritas pemerintah, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan swasta. **Tahap 2** menyaring undang-undang yang relevan untuk mengidentifikasi ketentuan potensial yang memengaruhi kesetaraan lapangan permainan dan untuk memahami alasan dan tujuan kebijakan mereka. **Tahap 3** menganalisis hak khusus, hak istimewa dan kewajiban Pos Indonesia secara mendalam. **Tahap 4** bertujuan untuk menyusun laporan dengan rekomendasi tidak mengikat. Draf kajian dan rekomendasi dibagikan dan didiskusikan dengan pemangku kepentingan publik yang relevan.

## BUMN dan netralitas kompetitif

BUMN dapat menikmati hak atau hak istimewa yang tidak tersedia bagi kompetitor swasta, yang dapat memberikan keunggulan kompetitif yang tidak semestinya. Keunggulan ini dapat mempersulit masuk atau ekspansi pasar bagi perusahaan swasta (dalam atau luar negeri) dan mengakibatkan munculnya hambatan persaingan. Pada saat yang sama, BUMN dapat dikenai kewajiban, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bersaing secara efektif dengan perusahaan swasta. Contoh keunggulan BUMN atau faktor yang dapat mempengaruhi netralitas kompetitif adalah:



## E-commerce dan jasa pengiriman paket kecil

Pandemi COVID-19 mengganggu *supply chain* global dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan memiliki dampak ekonomi yang signifikan dengan kontraksi PDB di sebagian besar negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, pada 2020. Namun, karena wabah COVID-19, penggunaan *e-commerce* meningkat secara tiba-tiba dan tajam. Pandemi COVID-19 akan mengarah pada perubahan jangka panjang, mempercepat peralihan ke *e-commerce*. Banyak bisnis ritel juga akan berkembang menawarkan layanan di luar ritel, termasuk *last-mile delivery*.

Indonesia sangat mementingkan *e-commerce* dengan mengidentifikasinya sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional dengan potensi ekonomi yang tinggi. Pada 2019, dengan nilai USD 21 miliar, Indonesia memiliki pasar *e-commerce* terbesar dan paling cepat berkembang di ASEAN. Dari 2015 hingga 2019, pasar *e-commerce* Indonesia tumbuh 88% per tahun dan diperkirakan mencapai USD 82 miliar pada tahun 2025 – dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 48% antara 2019 dan 2025.

### Nilai pasar *e-commerce* di Indonesia (2015-2025)



Sumber: Google, Temasek and Bain & Company, e-Economy SEA, 2019.

Seiring dengan pertumbuhan pasar e-commerce Indonesia yang pesat, pasar jasa pengiriman paket kecil menjadi salah satu yang paling kompetitif di kawasan ini. Pelaku pasar menganggap harga yang dibebankan kepada pelanggan akhir termasuk yang terendah di ASEAN, dengan beberapa platform e-commerce bahkan menawarkan pengiriman gratis.

## BUMN dan sektor jasa pengiriman paket kecil

BUMN memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk dalam layanan pengiriman. Pada 2019, Indonesia memiliki 114 BUMN dengan nilai aset gabungan Rp 8.725 triliun, mewakili lebih dari 50% PDB negara.



Sumber: Kementerian BUMN (2019) Laporan kinerja 2019.

Seperti halnya di negara lain, pemerintah sudah aktif di sektor pos di Indonesia selama bertahun-tahun. Operator pos petahana, Pos Indonesia, didirikan pada 1746 sebagai kantor pos di Jakarta dan sekarang menjadi perseroan terbatas yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah.

Meskipun Pos Indonesia menjalankan kewajiban pelayanan publik (KPP) untuk mengirimkan surat dan parcel, termasuk paket kecil, ke seluruh Indonesia, monopoli pengiriman dokumen dan paket di bawah dua kilogram dicabut pada 2009. Dengan demikian, kerangka hukum mengizinkan penyedia JPPK mana pun untuk menawarkan layanan ini, selama memenuhi persyaratan tertentu.

Pada 2019, terdapat lebih dari 600 operator berlisensi yang aktif di Indonesia, dengan pemain terbesar adalah JNE, TIKI, J&T Express, dan Pos Indonesia. Pos Indonesia mengelola salah satu jaringan terbesar di negara ini dan mengoperasikan layanan non-ekspres (pos) dan layanan ekspres (kurir).

## Rekomendasi Kunci

1. Memastikan bahwa Pos Indonesia menerima kompensasi yang memadai untuk kegiatan non-komersialnya kepada lembaga pemerintah dan otoritas publik lainnya.
2. Memastikan bahwa BUMN dengan kewajiban pelayanan publik, seperti Pos Indonesia, mematuhi pemisahan akuntansi dan persyaratan pelaporan untuk mencegah layanan komersial disubsidi silang oleh dana yang ditujukan untuk kewajiban pelayanan publik.
3. Memastikan bahwa pengadaan publik BUMN mengikuti proses yang kompetitif dan membatasi ruang lingkup perjanjian preferensial.
4. Mempertimbangkan untuk memberi mandat kepada Kominfo untuk menyelenggarakan konsultasi publik atau seruan untuk menyatakan minat untuk menanyakan apakah perusahaan swasta memiliki ketertarikan untuk melaksanakan KPP. Ini bisa menjadi langkah awal untuk mengembangkan tender KPP.
5. Memastikan bahwa pengurus BUMN cukup otonom dan kompeten serta pengangkatan langsung oleh Menteri dibatasi pada situasi tertentu. Untuk hal ini, (i) memperkuat uji “kelayakan dan kepatutan” untuk mengurangi risiko politisasi pengangkatan komisaris dan direktur; dan (ii) memastikan bahwa penilaian pengujian ini dilaksanakan oleh entitas independen.

**Catatan:** Penyusunan laporan ini dan proses wawancara pengumpulan datanya dilaksanakan pada tahun 2019, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini telah menciptakan perubahan yang signifikan terhadap lanskap regulasi di Indonesia, yang bertujuan untuk menarik investasi dan meningkatkan kemudahan berusaha. Perubahan lanskap regulasi akibat Undang-Undang Cipta Kerja ini belum dicakup di dalam laporan hasil studi.

## Fostering Competition in ASEAN

Didanai oleh ASEAN Economic Reform Programme under the UK Foreign, Commonwealth & Development Office (Pemerintah Inggris), **Fostering competition in ASEAN** adalah proyek yang bertujuan untuk menilai batasan peraturan tentang persaingan di sektor logistik di 10 negara ASEAN mengidentifikasi peraturan yang menghambat fungsi pasar yang efisien dan menciptakan lapangan bermain yang tidak setara untuk bisnis.

Proyek ini menjalankan dua komponen paralel: **kajian penilaian persaingan** dari sub-sektor logistik tertentu dan **kajian netralitas kompetitif** dari jasa pengiriman paket kecil.

Laporan ini dan laporan yang menyertainya "Kajian Netralitas Kompetitif OECD: Jasa Pengiriman Paket Kecil di Indonesia" merupakan kontribusi bagi penerapan Rencana Aksi Persaingan ASEAN.

